

STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

THE STRATEGY OF TRADITIONAL OIL MINING COMMUNITY AMID THE WIDESPREAD STATE CONTROL OVER NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA

Rio Heykhal Belvage

Sekolah Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada
rio.belvage@gmail.com

Abstrak

Tambang minyak adalah salah satu sektor industri ekstraktif bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sewu Jati yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat tambang minyak bekas perusahaan Belanda. Sejak perusahaan tersebut melakukan kapitalisasi terhadap sumber minyak di Sewu Jati, yang kemudian dilanjutkan oleh rezim elit desa dan koperasi, masyarakat terus mengalami peminggiran. Berkaitan dengan meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya akses masyarakat terhadap usaha penambangan di daerahnya, tulisan ini menggambarkan strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya.

Kata Kunci: tambang minyak, kontrol negara, strategi bertahan

Abstract

Oil mine is one of the extractive industries with high economic value. In Sewu Jati Village located on the border of East Java and Central Java, there is an oil mine well formerly owned by a Netherlands' company. Since the company began to capitalize the oil resources in Sewu Jati, followed by local village elite regime and cooperative business, local mining community is marginalized continuously. Widespread state control over natural resources undeniably has impacts on the mining community's access of production in Sewu Jati. This paper draws the strategy of local mining community in maintaining their business.

Keywords: oil mine, state control, survival strategy

Latar Belakang

Di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan asing, terdapat sebuah desa bernama Sewu Jati. Di sana warga mengusahakan sendiri persediaan minyak yang dimiliki oleh wilayahnya. Minyak diproduksi oleh penduduk bersama dengan warga dari luar desa, bahkan sampai menciptakan rantai distribusi sendiri. Letaknya tidak jauh dari area tambang Blok Cepu yang merupakan bekas perusahaan Belanda, *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM).

Atas aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, oleh negara mereka dicap melakukan aktivitas ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat (dikutip dari artikel "Penambang Minyak Tradisional", www.sakti.tv). Pendapat berbeda diajukan oleh film dokumenter berjudul *Gubug Reyot di atas Minyak Internasional* yang merekam aktivitas ekonomi penambangan di desa itu: hingga kini (tahun 2008-2009) aktivitas ekonomi penambangan minyak itu tidak memperoleh perlindungan hukum.

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai aktivitas ekonomi penambangan, satu pihak melihat kegiatan tersebut sebagai aktivitas ilegal karena tidak mengantongi izin, pihak lain melihat aktivitas ekonomi tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Sementara dari persepsi masyarakat sendiri, yang sedikit banyak terwakili oleh penelitian Juhadi, dkk (2013) dalam “Persepsi Masyarakat Penambang Tradisional terhadap Sumberdaya Minyak Bumi di Kawasan Cepu” menyatakan bahwa aktivitas ekonomi penambangan tradisional di desa-desa Blok Cepu merupakan cara untuk mempertahankan budaya dengan menyesuaikan kondisi sosial dan lingkungan alam. Dengan berlarut-larutnya proses pengaturan tata kelola ladang minyak tersebut proses secara ilegal pengelolaan minyak mentah yang dilakukan para penambang, penyuling dan pedagang engkrek, bisa dipastikan masih terus berjalan (Sudarmojo, 2011).

Pernah suatu kali di tahun 2006, karena rendahnya imbal jasa yang diterima oleh buruh dan pemilik sumur minyak, penambang tradisional ini secara bersama-sama melakukan aksi boikot terhadap sebuah koperasi yang dibentuk oleh Pertamina (Yudhanto, 2011: 8). Sejak saat itu operasi penambangan kemudian berjalan di luar campur tangan Pertamina (catatan lapangan, 18 Mei 2014). Para penambang lebih memilih menjual sendiri minyaknya daripada menjual ke Pertamina, tetapi dengan harga murah.

Sebagaimana yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan di mana kontrol terhadap sumber daya alam yang diterapkan oleh negara merangsang munculnya berbagai bentuk protes sosial, dan bahkan lebih jauh lagi, menstimulus lahirnya aksi-aksi perbanditan di beberapa daerah (lihat, misalnya, studi Suhartono W. Pranoto (2010) yang berjudul “Bandit-bandit Perdesaan: Studi Historis 1850-1942”).

Di sekitar wilayah operasi tambang Blok Cepu, di sela-sela tempat itu berlangsung kegiatan produksi dan distribusi minyak dalam skala lokal. Menariknya, dalam aktivitas produksi skala lokal ini, para pelaku memiliki beragam julukan seperti; penambang liar, penambang ilegal, penambang tanpa izin (PETI), penambang rakyat, penambang tradisional, hingga *wong samin* (salah satu

komunitas dengan kearifan lokal Jawa yang memiliki nilai atau pandangan hidup yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya).

Permasalahan

Sewu Jati sebagai sebuah desa penghasil minyak memiliki sejarah eksploitasi yang sangat panjang. Eksploitasi telah berlangsung bahkan sejak masa kolonial. Meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam tentu memberi dampak pada merosotnya akses masyarakat terhadap usaha ekonomi penambangan di daerahnya. Kenyataan semacam ini mengantarkan penulis pada dua pertanyaan: *Pertama*, seperti apa dinamika sosial masyarakat penambang dalam sejarah ladang minyak di Sewu Jati? *Kedua*, bagaimana strategi masyarakat penambang menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam?

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitiannya di wilayah pertambangan di Jawa Barat, Iskandar Zulkarnain, dkk (2003) melihat secara umum konflik yang berkembang di daerah pertambangan di Indonesia muncul karena adanya sifat yang khas dari kawasan pertambangan. Kawasan pertambangan biasanya berlokasi di daerah yang relatif terpencil dan belum begitu berkembang termasuk masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan memerlukan teknologi yang maju dengan fasilitas memadai. Akibatnya jurang kesenjangan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal menganga demikian lebar dan ini selalu melahirkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar (Zulkarnain dkk., 2003: 5).

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai aktivitas ekonomi penambangan ilegal. Beberapa di antaranya penelitian Isa Ansari (2007) berjudul “Penambangan Emas Tanpa Izin: Eksploitasi dan Kerusakan Ekologi di Mandor, Kalimantan Barat”. Dalam penelitian tersebut, Ansari menampilkan dampak aktivitas penambangan terhadap lingkungan dan kultur masyarakat lokal. Dengan berangkat pada asumsi bahwa wilayah pertambangan sebagai *frontier*, yakni wilayah “kosong tak bertuan” yang mengandung potensi ekonomi tanpa batas, Ansari menemukan bahwa

penambangan tanpa izin telah mengakibatkan kerusakan budaya dan lingkungan (*Lihat*, Isa Ansari, 2007: 13-14). Penambangan ilegal tersebut terus berlangsung karena selain menguntungkan, juga karena adanya kolaborasi antara penambang dengan masyarakat lokal yang cenderung resisten terhadap negara.

Yudhanto (2011) dalam penelitian di Blok Cepu berjudul "Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di Tengah Rendahnya Imbal Jasa", melihat lebih jauh. Ia menemukan adanya unsur resistensi dalam konflik yang berlangsung antara penambang dan negara yang dipicu rendahnya imbal jasa yang diterima penambang dari negara. Resistensi masyarakat lokal lebih dikarenakan oleh kebutuhan bertahan hidup. Perlawanan memuncak ditandai dengan aksi boikot setoran minyak pada tahun 2006 kepada koperasi bentukan Pertamina. Aksi itu berlanjut dengan membangun jaringan pasar lokal/ilegal sebagai cara untuk menjual hasil produksi minyak. Inilah yang dilihat oleh Yudhanto sebagai strategi perlawanan. Akan tetapi, penulis melihat perlawanan yang dimaksud Yudhanto masih sebatas "aksi-aksi terbuka" tanpa melihat lebih dalam lagi, seperti misalnya, bagaimana strategi boikot itu bekerja, apakah boikot tersebut bersifat spontan atau terorganisir, jika terorganisir siapakah yang menggerakkan aksi boikot hingga mampu membentuk jaringan dan rantai distribusi sendiri? Pembahasan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi Yudhanto tersebut.

Tulisan lain, dari Widodo (2013) dalam buku berjudul "Menanam adalah Melawan!". Dalam tulisan tersebut, ia memaparkan bagaimana kebijakan negara yang berencana membuka tambang pasir besi di Kulon Progo yang mengatasnamakan pembangunan, pada praktiknya justru mengancam kelangsungan hidup masyarakat tempatan. Sebagai saksi sekaligus pelaku (petani) di Kulon Progo, Yogyakarta, Widodo menceritakan latar belakang perlawanan yang dilakukan para petani di Kulon Progo. Di lahan pertanian yang telah lama menjadi sumber ekonomi petani, akan dibangun pertambangan pasir besi. Karena lahan mereka terdesak oleh rencana pembangunan, muncullah penolakan di kalangan petani. Reaksi perlawanan bermula dari sini, dengan membentuk paguyuban petani, membangun solidaritas dan

jaringan bersama para aktivis, akademisi, bahkan sebagaimana disebutkan olehnya, jejaring solidaritas itu hingga lintas negara, seperti *Melbourne Anarchist Club* dari Australia dan *Casual Anarchist Federation* (CAF) yang berpusat di Inggris. Hal tersebut dilakukan untuk memperbesar kapasitas suara dalam menolak rencana pembangunan tambang pasir besi. Selain dengan membangun jaringan, perlawanan juga dilakukan secara simbolik oleh Widodo sendiri - melalui tulisannya yang mewakili sudut pandang *emic* - dengan memperkenalkan slogan "Menanam adalah Melawan!" sebagai judul bukunya. Secara metode, tulisan Widodo ini menarik karena selain sebagai penulis, ia juga merupakan orang yang terlibat langsung dalam aksi-aksi perlawanan. Ia memiliki lahan pertanian yang terancam oleh agenda pembangunan.

Berbagai studi di atas memperlihatkan upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan sumber hidup yang terancam, karena kebijakan yang berubah dinilai dapat mengganggu proses produksi (Sarmini, 2003: 262), yang akhirnya menyudutkan aktivitas ekonomi masyarakat tempatan. Namun, penulis belum mendapati perhatian para penulis pada cerita-cerita dari sudut pandang penambang guna menjaga usahanya. Mustahil perlawanan sebagai usaha mempertahankan diri dilakukan tanpa adanya strategi untuk menjaga kelangsungannya. Perhatian Iskandar Zulkarnain, dkk. (2003) misalnya, berhenti pada pemetaan sumber konflik dan konstruksi identitas penambang yang disebut sebagai Penambangan Tanpa Izin (PETI) - yang jika diletakkan dalam formasi diskursif Foucaultian, akan terlihat bahwa pemunculan istilah PETI oleh Zulkarnain dkk. tersebut tidak lain merupakan bagian dari contoh kecil tentang bagaimana wacana identitas diproduksi oleh lembaga yang memiliki akses pengetahuan (dan kekuasaan) guna menciptakan legalitas tentang pengelolaan sumber daya alam.

Kerangka Berpikir

Pada bagian ini penulis menguraikan alur berpikir penelitian ini dengan berangkat dari pembacaan geopolitik. Penambang minyak di Sewu Jati dikenal sebagai penambang minyak tradisional yang mengacu pada penggunaan teknologi produksi yang masih sederhana. Namun

begitu, berkaitan dengan kelangsungan aktivitas ekonomi, seperti dinyatakan oleh Eric Wolf (1983), bahwa untuk mengatakan sebuah masyarakat “tradisional”, atau bahwa penduduknya terikat oleh tradisi, tidak menjelaskan mengapa tradisi itu dapat bertahan terus, atau mengapa mereka terus melekat pada tradisi itu. Mitos desa “tradisional” Jawa yang tertutup dan komunal adalah ciptaan negara koloni Belanda dan dilestarikan terus oleh negara modern Indonesia untuk memudahkan klasifikasi tanah dan mengabsahkan penguasaan negara atas tanah-tanah tertentu, termasuk tanah hutan (Peluso, 2006: 44). Oleh karena itu untuk mendefinisikan suatu daerah, masyarakat, dan praktik tertentu sebagai pinggir, tidak tertib, “tradisional”, dan/atau memerlukan “pembangunan” tidak hanya melalui pengungkapan dunia sosial yang ada, tetapi juga berarti membeberkan wacana tentang kekuasaan (Tania Li, 2002: 21).

Wacana dipahami sebagai peristiwa bahasa yang di dalamnya berlangsung bentuk kuasa yang saling berkonfrontasi satu sama lain, sebuah pertarungan antarwacana melalui wacana, teks beredar dan saling menanggapi, memberi kunci untuk memahami pola hubungan kuasa, dominasi, dan konfrontasi di mana wacana hadir serta berfungsi (Ricoeur, 2003; Setyobudi, 2005: 9). Dalam konfrontasi tersebut berlangsung strategi dominasi dan siasat bertahan dari struktur dominan. Apa yang dimaksud sebagai strategi dipahami sebagai pola-pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Sumintarsih, 2003: 152-153) - dalam kaitannya dengan upaya untuk mempertahankan serta melangsungkan kehidupan, yang oleh karena itu setiap makhluk hidup (baca: manusia) perlu melakukan adaptasi (Raharjana, 2003: 71).

Proses dominasi pada praktiknya terwujud dalam bentuk-bentuk eksploitasi terhadap kelompok minoritas. Tidak dapat dihindari bahwa konfrontasi yang berlangsung sebagai perseteruan antarkelas melahirkan resistensi dari pihak yang kalah. Resistensi ini terdiri atas ideologi, struktur sosial lokal, dan sejarah merupakan konfigurasi kontekstual dari tanggapan petani umumnya terhadap pengendalian pihak luar dan pengambilan sumber daya oleh negara (Peluso, 2006: 22). Di sinilah ekonomi moral memainkan peran penting sebagai bagian dari sistem nilai yang menentukan tindakan

petani. Meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam dan desakan kekuatan pasar menjadikan ekonomi moral sebagai pilihan rasional untuk menjaga struktur tradisional. Situasi ini mengingatkan pada apa yang pernah diulas Polanyi (1971) tentang kehidupan petani di Inggris dan Perancis pada abad ke-17, di mana kekuatan lokal berusaha menghalangi atau setidaknya membatasi permainan kekuatan pasar dengan jalan menghidup-hidupkan ekonomi moral (*lihat*, Scott, 1994: 13-14). Dalam hal ini ekonomi moral memusatkan perhatian pada apa yang dipikirkan dan diyakini petani mengenai dunianya, pada pandangan hidup yang digunakan untuk menjelaskan tindakan mereka (*lihat*, Scott, 1994; Ahimsa-Putra, 2003). Bila dalam perseteruan tersebut penambang menghidup-hidupkan ekonomi moral sebagai strategi untuk menyiasati keadaan, maka posisi negara dalam hal ini, seperti digambarkan Scott;

“Dalam drama ini negara merupakan pelaku pula, sama halnya dengan para pemilik faktor-faktor produksi yang langka. Tidak hanya negara menyediakan sarana-sarana hukum dan paksaan yang diperlukan untuk menjamin agar kontrak-kontrak ditaati dan ekonomi pasar dipertahankan, malahan negara sendiri merupakan salah satu pihak yang menuntut haknya atas penghasilan petani (Scott, 1994: 12)”.

Di sinilah dalam perspektif Scottian tentang resistensi menjadi strategi bertahan karena struktur dominan memposisikan petani dekat dengan “garis bahaya”. Oleh karena itu sejalan dengan asumsi Scott, melalui prinsip “dahulukan selamat” penambang memperkuat ekonomi moralnya dengan menjalin hubungan patron-klien. Namun lebih dari itu, sesuai kondisi di lapangan penelitian yang rentan konflik, penulis membawa konsep resistensi ala Scott dengan bersandar pada konsep Hobsbawm (1972) yang dikembangkan oleh Pranoto (2010) dalam melihat dunia perbanditan Jawa di masa lalu;

“Dalam hal ideologi perbanditan perdesaan letaknya ada di tengah antara resistensi petaninya Scott dengan mesianismenya Sartono Kartodirdjo..., Perbanditan sosial lebih merupakan kombinasi antara *everyday forms of peasant resistance* dan *peasant revolt*. Ideologi gerakan perbanditan memang anti-penguasa yang ekstraktif dengan latar

belakang sekuler lebih dominan daripada religius. Memang pada dasarnya gerakan itu muncul karena terdesak oleh ekspansi perkebunan yang mempersempit lahan dan hajat hidup petani. Dari sinilah timbul perasaan tidak senang dan dilampiaskan dalam bentuk gerakan perbanditan. Gerakan ini bertujuan mengembalikan miliknya yang telah diserobot “penguasa”. Dipandang dari ideologinya, perbanditan perdesaan lebih menitikberatkan hal-hal yang sifatnya riil dan ekonomis, artinya menghadapi kepentingan primer yang merupakan hajat hidup bersama dalam masyarakat perdesaan (Pranoto, 2010: 117-118)”.

Perlu digarisbawahi bahwa bandit yang dimaksudkan oleh Pranoto di sini (dan juga pada tulisan ini) bukanlah bandit kriminal seperti banyak dipahami oleh media dan masyarakat umum dewasa ini, bukan pula bandit berdasi yang biasa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan bandit yang berpihak pada rakyat, *Maling Aguna* yang melakukan perbuatan mulia karena mendapatkan dukungan dari masyarakat perdesaan (*lihat*, Pranoto 2010: vi). Pranoto melihat bahwa gerakan bandit merupakan ekspresi perlawanan masyarakat yang terpinggirkan oleh struktur kolonial yang dominan. Dengan demikian melalui pijakan kerangka berpikir historis tersebut, penulis menggunakannya sebagai alur untuk menuntun uraian tulisan ini.

Metodologi Analisis Data

Sewu Jati dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut dapat mewakili gambaran mengenai dinamika resistensi penambang tradisional terhadap negara, yang dilakukan melalui “aksi pelanggaran terus-menerus” (penambangan ilegal), terlebih Sewu Jati berada dekat dengan perusahaan penambangan legal skala global. Pemilihan Sewu Jati sebagai lokasi penelitian, didasarkan salah satunya karena faktor historis. Dalam konteks historis, masyarakat di sana memiliki pengalaman kolektif yang membedakan dirinya dengan masyarakat desa lain. Perbedaan ini terkait dengan aktivitas ekonomi penambangan yang telah ditekuni sejak tahun 1942 (Yudhanto, 2011: 8), yang berarti aktivitas tersebut telah ada sejak sebelum Indonesia sebagai negara baru hadir

dengan regulasi dan kebijakan yang baik langsung maupun tidak, berpengaruh pada kelangsungan hidup penambang minyak tradisional. Wacana historis ini direproduksi, baik melalui lisan ataupun tulisan, yang seiring dengan pesatnya teknologi, dapat ditemukan di berbagai laman di internet, seperti misalnya pada laman www.jonegoroan.com yang berjudul Sejarah Industri Minyak di Bojonegoro.

Untuk memperoleh sumber sejarah lisan (*oral history*), penulis melakukan wawancara kepada beberapa tetua desa yang berusia di atas 60 tahun. Sejarah lisan menjadi penting karena dengan begitu dapat diketahui bagaimana representasi ingatan kolektif masyarakat. Dalam hal ini, ingatan mencerminkan suatu persepsi manusia tentang dunia, dan panggung tempat manusia mengoreksi lakon yang telah dimainkannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang memfokuskan pada orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas ekonomi penambangan tradisional. Beberapa metode tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan mozaik tentang aktivitas penambangan di Sewu Jati. Keduanya menjadi data primer yang dianalisis secara kualitatif. Selain itu, terdapat sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder antara lain yaitu sumber literatur yang mengulas wacana ekonomi penambangan tradisional yang berupa buku, jurnal ilmiah, koran elektronik, majalah, film dokumenter, maupun wacana-wacana yang berasal dari media *online*.

Penelitian ini juga menggunakan analisis wacana yang didasarkan pertama-tama dari data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data tersebut direfleksikan dengan wacana yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder untuk memperoleh gambaran tentang relasi wacana aktivitas penambangan di Sewu Jati. Wacana yang dimaksud di sini terdiri dari berbagai macam topik yang dinilai memiliki titik singgung dengan aktivitas ekonomi penambangan. Melalui serangkaian metode penelitian inilah selanjutnya data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Meniru penamaan lokasi etnografi Geertz dalam penyebutan Pare sebagai Mojokuto, penulis

sengaja membuat nama lain dari daerah sebenarnya tempat penelitian ini dilakukan, berikut beserta nama-nama tokoh yang hadir di buku ini. Hal itu dilakukan selain agar tidak menyinggung subjek bilamana ada penjelasan yang kurang mengemukakan, juga sekaligus untuk menghindari kemungkinan lain yang bisa saja timbul dari tulisan ini. Persoalan bukanlah nama orang atau nama tempat, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat oleh negara tanpa mempertimbangkan aspek lokalitas dapat mengakibatkan masyarakat mendapat getah pembangunan. Tulisan ini ditujukan sebagai refleksi bahwa fenomena yang diulas dalam pembahasan ini bukan hal yang bersifat “unik”, melainkan terjadi di banyak tempat di Indonesia, terutama di daerah yang oleh logika ekonomi kapitalisme global dilihat mengandung potensi sumber daya ekstraktif yang besar.

Pembahasan

Sewu Jati terletak di kawasan pegunungan dengan permukaan tanah berbukit-bukit. Secara administratif, Sewu Jati adalah salah satu desa dari lima desa yang terdapat di Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Sewu Jati berada di atas bukit dan diapit dua perbatasan provinsi dan kabupaten. Di sisi barat Sewu Jati berbatasan dengan daerah Cepu yang masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah, dan di sisi timur berbatasan dengan Tuban yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Tandusnya jenis tanah lempung berkapur menyebabkan Desa Sewu Jati kurang mendukung untuk ditanami jenis tanaman padi. Satu-satunya penopang ekonomi masyarakat Sewu Jati disandarkan dari ladang minyak di sumur tua. Potensi sumur minyak tua inilah yang membuat Sewu Jati bertahan dari berbagai keterbatasan dan bahkan kian bergairah menghadapi pasang surut dinamika sosial dewasa ini.

a. Sejarah Tambang Minyak di Sewu Jati

Pada zaman dulu Sewu Jati merupakan bagian dari daerah operasi tambang minyak Belanda yang pada masa selanjutnya lebih dikenal dengan Blok Cepu. Di samping narasi sejarah umum tentang pertambangan, masyarakat juga memiliki catatan sejarah menurut versinya sendiri. Sejarah tersebut dituturkan oleh para pelakunya,

yakni leluhur dari masyarakat Sewu Jati sendiri dan kemudian ditransliterasikan ke dalam tulisan tangan huruf latin. Sebagaimana yang ada di bawah ini;

“Sekedar cerita hak sumber tani minyak Sewu Jati sebelum ada Belanda datang di Desa Sewu Jati. Rakyat Desa Sewu Jati situ sudah punya sumber (*belik*) Sumur belikan/ lantung. Cara menggunakan hasil sumber itu untuk gilir-bergilir Rakyat seluruhnya Desa Sewu Jati itu. Untuk mencari sandang pangan Rakyat seluruhnya. Dan kalau menjualnya Lantung itu jauh sekali, di blantaran Cepu, Ngawi, Madiun, di Pacitan, di Maospati dan lain-lainnya. Dijual pakai jan belum ada Blik adanya baru jan dipikul. Lalu lama kelamakan ada Belanda datang 2 orang yang bernama Tuan Rain dan Tuan Marfis. Belanda itu punya peraturan. Seb. Rakyat tidak diperbolehkan ambil lantung tetapi sumber itu disewa tiap minggu dibayar atau diberi sewa dengan yang sebanyak Rp.10- tapi Desa Sewu Jati Rakyatnya belum begitu banyak baru 25 penduduk/KK.

Sumur tersebut lama kelamakan menjadi ramai, bisa dikatakan pabrik. Tahun 1942 Jepang datang, Belanda mundur. Sumuran sewa bayaran sudah tidak diurus dengan Belanda. Belanda sudah kalah sama Jepang. Semua Rakyat di Desa Sewu Jati kembali ambil lantung lagi sebab sawa ladangnya hanya itu. Jepang tidak mengurus sumuran sebab Belanda akan lari atau mundur semua. Sumuran sumbernya di barit/disemen dan dirusak dan yang masih ketinggalan tidak dirusak sedikit-sedikit masih keluar minyaknya diambil Rakyat Desa Sewu Jati untuk mencari sandang pangan lagi. Tetapi kalau tahu sama Jepang ditembak mati. Banyak orang yang mati. Dengan Jepang mundur Rakyat kerja seperti biasa mencari sumber yang masih bisa digali untuk makan penduduk Sewu Jati situ.

Tahun 1949 Belanda datang lagi (AGRESI). La ini Bapak Pemerintah mengalami susah payah. Mulai th 1942-1949 hidup mati setiap harinya. Semua Rakyat Indonesia hidup menderita seperti Anak Ayam ketinggalan hinduknya makan sak adanya. Lebih-lebih di Desa Sewu Jati sawa ladang sangat mines. Sangat sempit waktu itu di Desa Sewu Jati dari daerah pendudukan Belanda.

Walaupun Desa Sewu Jati tanah mines tetapi diduduki Tentara yang sebanyak 82 orang. Yang menjadi kepala desa orang yang bernama

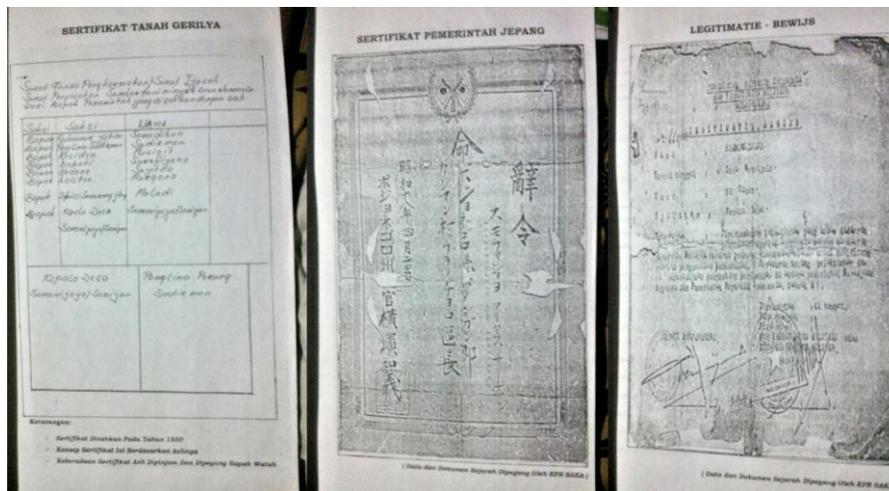
Somowijoyo/Sarijan jadi Kepala Desa P.D.T.H 1942-TH.1951 menjadi Kepala Desa di situ.

Sudah disebutkan diatas ladang sawah sangat mines. Untuk melayani Tentara Gerliya yang sedikit. Untuk Rakyat Di Desa Sewu Jati sedikit. Kepala desa berjuang mintak supaya hasil Rakyat dari sumber tani minyak itu bisa disahkan sama Rakyat atas nama tanah (Gerliya).

Kepala desa yang bernama Somowijoyo (Sarijan) ketika ikut berontak melawan Jepang di pasar juat. Di Semarang. Gerliya di Cepu dia juga ikut. Bahkan hasil senjata sebanyak 14 senjata. 2 Belanda saksi Gerliya teman masih ada teman Duduk di daerah Lamongan. Bahkan Tentara dapat pensiun. Orang Sewu Jati lalu tahun 1951 sudah aman. Kepala Desa Sewu Jati mintak dihentikan dengan hormat dan dia mohon dengan hormat kalau bisa atau boleh sebelum sebelum kepala desa berhenti, Bapak Pemerintah mengesahkan adanya sumber tani minyak dimasukan Sumber Gerliya (Tanah Gerliya). Sebab di waktu bangsa kita atau Rakyat Sewu Jati montrang-mantring seperti pohon ditimpa angin. P.D.T.H 1950 Bulan September permohonan dilaksanakan dan disahkan denga Sah.

Pertengahan Bulan September Bapak Pemerintah langsung meninjo dipabrik. Lain hari Kepala Desa dipanggil dikantor Gubernur di Surabaya. Gubernur di waktu itu Bapak Pamuji tetapi baru dipanggil sekali panggilan yang ke II sudah Bapak Gubernur Samadikun yang menerima panggilan. Sampai III kali, yang isinya Kepala Desa Somowijoyo/Sarijan tidak boleh berhinti diajak bekerja yang sampai jaman tentram tetapi Kepala Desa Somowijoyo maksa mintak berhenti saja dan tidak ditrima seluruh Pejabat yang berwajib tidak mau dikembalikan di Kepala Desa lagi.”

Berdasarkan arsip sejarah yang disimpan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) di Sewu Jati, pada tahun 1950, seluruh wilayah yang meliputi Sewu Jati, termasuk sumur *lantung* (minyak mentah) peninggalan Belanda yang berada di dalamnya mendapat pengesahan pembebasan lahan sebagai bentuk tanda penghormatan kepada warga Sewu Jati. Surat pengesahan ini dikenal dengan nama “Sertifikat Tanah Gerilya”, yang diketahui oleh Kepala Desa di masa itu, Somowidjoyo alias Saridjan dan Panglima Perang Sudirman.



Gambar 1.

Tiga arsip di atas, satu arsip menerangkan kepemilikan tanah melalui “sertifikat tanah gerilya”, dua arsip lain adalah fotokopi dokumen yang berasal dari masa pendudukan Belanda (berbahasa Belanda) dan Jepang (berbahasa Jepang) (Sumber: Rio Heykhal Belvage). Dari dua arsip berbahasa asing tersebut, satu arsip berbahasa Jepang berhasil diketahui terjemahannya. Setelah melalui pelacakan lebih lanjut untuk memastikan isi dari arsip tersebut, diketahui bahwa arti dari arsip yang berhuruf kanji di atas bukanlah sebagaimana yang dinyatakan di awal. Secara ringkas arsip Jepang itu menerangkan tentang surat pengunduran diri Lurah Kasiman di masa lalu (tahun 1944) di bawah wewenang Jepang. Atas bantuan dan ketelatenannya melacak huruf kanji lama, penulis berterima kasih pada Ben, mahasiswa sastra Jepang yang pada saat penelitian ini dilangsungkan, ia sedang melanjutkan studi di Sanata Dharma, Yogyakarta.

b. Perbanditan Kaum Pembangkang

“*Aku opo wae dek biyen tak lawan mas (saya apa aja dulu saya lawan, mas), wes pokok’e koyo nduwe nyawa rangkep (pokoknya sudah seperti punya nyawa rangkap), lha piye neh, urip e yo susah, arep mangan ae angel (lha mau gimana lagi, hidup aja susah, mau makan susah), anakku wedok dek biyen sek cilik, tak gendongi neng ndi-ndi karo mergawe (anak perempuanku dulu masih kecil, kemana-mana saya gendong sambil bekerja)”*.”

Seorang informan yang dulu mengalami masa-masa sulit bercerita kepada penulis. Demi memenuhi tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ia merangkap dua pekerjaan sekaligus, sebagai penambang dan pencuri kayu di hutan. Apa yang dikisahkan oleh informan di atas menegaskan betapa susahnyanya hidup di zaman itu. Beratnya kondisi ekonomi yang harus dihadapi ketika itu, bahkan sampai memunculkan istilah tersendiri. Di desa yang tidak jauh dari desa tempat penelitian ini dilangsungkan, terdapat tanah yang dijuluki “Magersaren”. Dalam pengertian umum, istilah Magersaren merujuk pada daerah yang sebenarnya merupakan tanah yang dimiliki oleh pihak Perhutani dan dimanfaatkan masyarakat desa hutan untuk ditanami jenis tanaman kebutuhan pokok, seperti jagung, padi dan ketela untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup. Namun bagi warga di sana, Magersaren juga memiliki arti lain yang merepresentasikan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Magersaren, kurang-lebih dimaknai sebagai “*Mergawe terus sego ra leren* (Kerja terus nasi terus-terusan). Keringat keluar terus untuk menyambung hidup, tetapi makan nasi saja susah. Kurang-lebih demikianlah artinya.

Pada bulan Oktober tahun 2006 aksi-aksi yang dilakukan oleh para penambang meluap dan menggerakkan aksi mogok oleh penambang di Sewu Jati terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) dengan alasan rendahnya imbal jasa. Kesadaran rendahnya imbal jasa yang didapat oleh para pekerja tambang ini menandai transisi masyarakat ke arah yang lebih rasional. Mereka mulai berhitung dan memutuskan untuk mengambil resiko dengan menjual sendiri minyak yang dihasilkannya ke pihak luar yang dapat menghasilkan untung lebih besar daripada menjualnya ke KUD.

Aksi mogok yang dilakukan oleh masyarakat penambang tersebut sekaligus menandai runtuhnya

KUD Bogo Sasono. Peristiwa ini sempat diulas pula oleh Yudhanto (2011) dalam strategi perlawanan petani tambang tradisional. Bila mengingat momen di mana mereka masih bekerja di bawah pengelolaan KUD, ada sentimen dan kemakuan yang penulis temukan dari orang-orang yang ditemui, di mana mereka bercerita secara ironik betapa susah hidup di masa itu, ketika minyak dihargai teramat rendah. Hal tersebut dapat dilihat secara historis dari harga jual *lantung* yang mereka produksi setiap harinya. Dulu, di zaman Lurah Sentono Wartyo harga *lantung* setiap drum berkapasitas 200 liter mendapat harga Rp.11.000,00. Ketika pindah ke KUD naik menjadi Rp.47.000,00 setiap drum. Namun, penambang menilai harga yang diberikan oleh KUD masih jauh dari standar yang mereka inginkan. Sampai kemudian setelah KUD runtuh dan mereka mengolah sendiri *lantung* yang mereka produksi, setiap drum *lantung* yang mereka hasilkan memperoleh harga Rp.85.000,00, hampir dua kali lipat dari harga yang didapat sebelumnya.

Di tengah kekosongan peran KUD dan masyarakat yang mengusahakan sendiri *lantung* yang diproduksi inilah, pihak Pertamina masuk hendak melakukan penertiban tata kelola produksi minyak di Sewu Jati. Memang di masa sebelumnya, ketika KUD Bogo Sasono masih bekerja sebagaimana mestinya, *lantung* yang dibeli dari warga ini oleh pihak KUD disetorkan ke Pertamina. Tetapi, setelah masyarakat memilih untuk menjual sendiri minyak mentahnya, Pertamina keberatan karena ia tidak memperoleh setoran *lantung* dari warga. Di masa ini, Pertamina memaksa warga untuk menyerahkan semua hasil *lantung* mereka ke Pertamina. Bentuk pemaksaan ini dilakukan dengan memperkenalkan istilah “ilegal” dan mempekerjakan pihak aparat keamanan untuk berjaga di perbatasan dan melakukan patroli rutin supaya minyak mentah tidak sampai dibawa ke luar.

Salah seorang informan bercerita kepada penulis, bahwa di masa itu, pihak warga juga tidak kekurangan akal menghadapi desakan Pertamina. Mereka melakukan pembagian kerja, ada yang bertugas sebagai mata-mata untuk mengintai di mana saja posisi para aparat ini beroperasi melakukan razia. Pembagian kerja yang menugaskan seseorang untuk menjadi mata-mata ini lagi-lagi mengingatkan pada penggambaran dunia bawah tanah perdesaan Jawa yang diulas Pranoto (2010) dengan mengutip Simmel dalam penelitiannya tentang perbanditan di Jawa;

“Dunia bawah tanah penuh rahasia, bohong, dusta, tipuan, jebakan, dll. Karena itu, tugas mata-mata penting sekali dan ia memegang penting pula sebelum kelompoknya melakukan operasi. Hal ini dimaksudkan agar usahanya sukses dan tidak terbongkar sebelum dan sesudah menjalankan aksinya (Simmel dalam Pranoto, 2010: 113)”.

Dengan mempekerjakan mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik aparat, para pekerja yang bertugas mengangkut minyak mentah dapat lolos dari patroli keamanan. Alasan mereka melakukan hal ini sederhana dan rasional secara ekonomi. Perbandingan harga jual yang mereka peroleh dari mendistribusikan secara gelap jauh lebih tinggi dari harga pembelian pihak Pertamina, bahkan mencapai tiga kali lipat. Kini untuk setiap drum *lantung* bermuatan 200 liter biasa dihargai antara 400 ribu hingga 600 ribu, tergantung kualitas *lantung* yang diproduksi.

Selain tugas menjadi mata-mata, untuk dapat lolos dari razia di tengah perjalanan ke luar kota, para penambang juga mempekerjakan marinir untuk mengawal perjalanan. “*Lek podho-podho aparat e kan sungkan arep nangkep* (Kalau sama-sama aparatnya kan ada rasa tidak enak kalau mau menangkap),” kata informan yang juga pernah menjual sendiri minyak mentah sampai ke daerah Pati, Jawa Tengah. *Lantung-lantung* ini, biasanya diangkut dengan menggunakan truk. Distribusi minyak pun semakin lama semakin meluas, bahkan sampai ada yang dibawa ke Jakarta dan diangkut dengan menggunakan peti kemas. Tetapi baru-baru ini, sebuah berita yang dilayangkan dari koran elektronik Tempo pada tanggal 14 Mei 2015 menampilkan berita berjudul “**Polisi Bojonegoro Sita 15 Ribu Liter Solar Ilegal**”. Dalam peristiwa tersebut, seorang Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro pada saat diwawancara menyebutkan barang sitaan sejumlah 15 ribu liter tersebut adalah hasil dari lima tangkapan dalam razia yang dijalankan selama satu bulan terakhir. Minyak-minyak itu diduga berasal dari proses tradisional di daerah sumur tua di Bojonegoro. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang telah membentuk tim untuk “menyelesaikan” masalah sumur tua ini. Tim yang terdiri atas Pertamina, Perhutani, Kepolisian, perangkat kecamatan, serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bojonegoro ini dibentuk pada pertengahan Maret 2015 lalu (dikutip dari www.nasional.tempo.co).

Dari berita tersebut di atas, tergambar seperti apa pola kepengaturan yang diterapkan oleh negara melalui institusinya sama sekali tidak menyertakan warga penambang sebagai objek dari kebijakan. Bila mencermati kata “menyelesaikan” dalam pemberitaan media tersebut dapat dipahami kemudian bagaimana kehadiran para penambang ini semata-mata diposisikan sebagai sumber segala masalah yang harus “diselesaikan”. Dalam formasi diskursif semacam inilah, dengan dibantu oleh media, para penambang menempati posisi sebagai objek dari kekuasaan yang berkehendak mendisiplinkan perilaku ekonomi sesuai dengan aturan yang telah dikreasi oleh negara, namun pada saat bersamaan beberapa institusi yang bersangkutan tersebut justru berpaling muka dan tidak mau tahu ketika dihadapkan dengan latar belakang yang mendasari perilaku ekonomi mereka. Hal ini terlihat bila kita menengok kembali ucapan salah seorang informan pada bagian awal tulisan ini: “*Aku opo wae dek biyen tak lawan mas* (saya apa aja dulu saya lawan, mas), *wes pokok’e koyo nduwe nyawa rangkep* (pokoknya sudah seperti punya nyawa rangkap), *lha piye neh, urip e yo susah, arep mangan ae angel* (lha mau gimana lagi, hidup aja susah, mau makan susah).

c. **Reproduksi Kekerasan oleh Negara**

Sebuah media elektronik berlabelan **www.news.detik.com** menulis berita konflik antara negara dengan rakyat pada 5 Februari 2014. Dalam berita berjudul “Penertiban Sumur Minyak Ilegal di Bojonegoro Mendapat Perlawanan”, ditulis berita sebagai berikut;

“Operasi penertiban sumur minyak ilegal di wilayah Kawengan, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, yang dilakukan Pertamina mendapat perlawanan. Massa menghadang akses jalan masuk lokasi sumur minyak tua Kawengan yang sedang ditertibkan. Bahkan, massa juga memaksa masuk ke Gedung Power Plant milik Pertamina EP, dan melakukan penghentian paksa aktivitas listrik, serta menyita alat berat milik kontraktor Pertamina.”

Pada hari yang sama, dalam sebuah media elektronik lain **kanalbojonegoro.com** melayangkan berita berjudul “Pasca Penertiban, Penambang Sumur Tua di Malo Resah”, seorang warga yang terlibat aksi perlawanan mengungkapkan kekesalannya kepada pihak aparat yang seenaknya melakukan penertiban tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kalau memang itu dikatakan ilegal, seharusnya kami diberitahu dulu. Apa alasannya itu ilegal dan kami harus bagaimana karena warga sudah berpuluh-puluh tahun menjadi penambang disitu,” tegas Danddy.

Jauh sebelum peristiwa perlawanan itu terjadi, yakni sekitar satu tahun sebelumnya, media elektronik **suarabanyuurip.com** meliput berita berjudul “Polisi Dilema Tangani Sumur Minyak Tua”. Dalam berita tersebut Kapolres Bojonegoro AKBP Rakhmat Setyadi menceritakan posisinya yang serba dilematis dalam penyelesaian kasus minyak ilegal.

“Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah membunuh orang-orang di sana? Usir semua orang, atau diberdayakan?” tandas Rakhmat Setyadi (dikutip dari www.suarabanyuurip.com).

Dalam berita tersebut, terlihat bahwa pihak aparat sendiri sebetulnya juga telah menyadari posisinya yang berada di tengah benturan konflik kepentingan antara negara dan rakyat.

“Selama ini harga minyak yang diberikan oleh Pertamina EP sangat murah, sedangkan kehidupan mereka bergantung dari itu. Di sini hukum alam terjadi, di mana mereka menjual minyak-minyak tersebut ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi,” tandas Kapolres Bojonegoro (dikutip dari www.suarabanyuurip.com).

Di lain waktu, ketika penulis berada di lokasi penelitian pada akhir minggu bulan Oktober 2014, penulis menjumpai peristiwa penyegelan sumur minyak di *alas etan*. *Alas etan* adalah wilayah lahan milik Pertamina yang menjalin kontrak karya dengan perusahaan Kerja Sama Operasional (KSO). Kejadian itu bermula dari pihak KSO yang melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa lokasi sumur tinggalan Belanda yang baru saja mereka perbaiki, diduduki oleh beberapa orang warga lokal. Pertamina sendiri merasa minyaknya dicuri. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan bersama antara Pertamina dan warga tentang pembagian wilayah produksi minyak. Masyarakat boleh memanfaatkan sumur yang ada di *alas barat*, tetapi untuk *alas timur* menjadi wilayah milik Pertamina.

Karakter sumur-sumur di *alas timur* milik Pertamina dan sumur-sumur di *alas barat* memang berbeda. Sumur di *alas barat* memiliki kedalaman 300 sampai 500 meter, yang karena *saking* banyak jumlah sumurnya, menyebabkan jumlah minyak yang

diproduksi tidak stabil antara sumur satu dengan sumur lainnya. Di *alas barat*, semua produksi *lantung* dikerjakan secara tradisional dengan menggunakan tenaga manusia untuk teknologi pengolahannya. Sementara di *alas timur*, sumur milik pihak Pertamina yang berada di kawasan Perhutani memiliki kedalaman antara 800 sampai 3000 meter dengan jumlah sumur yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan sumur di *alas barat* yang jumlahnya sampai ratusan. Sumur milik Pertamina dikerjakan dengan mewarisi teknologi dari zaman Belanda, penambangan dilakukan dengan mesin-mesin yang telah diperbarui dengan hasil minyak yang langsung dialirkan melalui pipa tua melewati hutan dan desa yang bermuara langsung ke pengolahan Pertamina.

Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal bermula ketika mesin penambang di sumur *alas timur* rusak dan tidak dapat berproduksi. Sebuah sumur yang sudah tidak beroperasi cukup lama kemudian diperbaiki oleh pihak Pertamina dan dikontrak oleh KSO. Setelah sumur selesai diperbaiki dan akan dioperasikan, beberapa orang (yang menurut keterangan informan adalah orang-orang kuat) memfungsikan sumur tersebut. Pihak aparat keamanan tadinya biasa saja. Sebab antara aparat keamanan dan orang-orang yang menduduki sumur tersebut sudah saling “sama-sama tahu”. Menurut keterangan informan, mereka telah bertemu sebelum menduduki sumur secara berkelompok. Tetapi, ketika pihak Pertamina melapor - dan entah suatu kebetulan atau bukan, pada saat itu Kapolres Bojonegoro baru saja diganti. Hal ini membuat aparat keamanan yang menduduki posisi bawahan tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa menjalankan perintah dari atasan barunya. Dari desas-desus yang penulis dengar, bila pihak Polres tidak dapat menangani kejadian itu, Markas Besar (Mabes) akan turun langsung untuk menyelesaikannya. Ultimatum semacam itu tentu membuat pihak Polres merasa ditekan untuk segera menyelesaikan masalah yang sebelumnya - menurut informan - telah diketahui bersama *alias* “tahu sama tahu”.

Salah seorang informan mengatakan kepada penulis bahwa para pemilik sumur di kawasan Pertamina adalah “orang-orang kuat”. Sementara informan lain yang merupakan pemilik sumur bercerita kepada penulis bahwa pada saat itu dirinya dan para pemilik lainnya merasa “*dilena* (ditipu)”. Biasanya di sumur *alas timur* selalu ada yang jaga secara bergantian dan membuat aparat “tidak berani”

mendekat. Penyegehan itu bermula ketika suatu kali semua pemilik sumur sedang menonton *tayuban* di desa sebelah. Di daerah yang dikelilingi jati ini seni pertunjukan *tayub* memang menjadi hiburan bagi warga desa di segala usia, terutama bagi para penambang lokal. Ketika semua penambang pergi menonton *tayub*, tanpa diduga para aparat datang pada subuh dini hari dan menyebar garis polisi pada mesin-mesin produksi *lantung* milik warga. Keesokan harinya saat hendak bekerja seperti biasa, mereka kaget bukan kepalang karena tanpa sepengetahuan mereka sumur-sumur yang didudukinya telah dilingkari garis polisi.

Sejak peristiwa penyegehan di akhir bulan Oktober sampai pertengahan November ketika penulis berada di lapangan, masalah tersebut belum juga tuntas. Garis polisi masih mengelilingi satu sumur di alas timur. Setiap hari, di sebuah gubug di tepi jalan yang tidak jauh dari tempat di mana sumur itu berada, selalu ada orang yang berjaga. Mereka adalah para penambang yang merasa memiliki hak terhadap sumur milik Pertamina. Penjagaan dilakukan untuk melindungi mesin-mesin produksi supaya tidak diangkut oleh pihak aparat keamanan.

Masyarakat Sewu Jati sendiri, baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam peristiwa itu, beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh warga dengan menduduki sumur milik Pertamina itu bukanlah tindak pencurian, karena *lantung* yang dihasilkan dari sumur itu juga ujungnya disetorkan ke pihak Pertamina. Peristiwa penyegehan tersebut tentu membuat hubungan antara warga penambang dan aparat yang semula baik-baik saja kemudian berubah menjadi sedikit tegang. Selama beberapa hari, setiap pagi penulis melihat dua mobil bak tentara melintas melewati desa menuju lokasi penambangan.

Lurah Sewu Jati sendiri yang juga salah seorang pemilik sumur minyak datang langsung ke Polres setelah kejadian penyegehan itu. Sampai saat penulis berada di lapangan, sudah hampir lima minggu berjalan, para pemilik sepertinya merelakan begitu saja sumur minyak Pertamina yang didudukinya. Melihat kejadian tersebut, seorang informan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kepemilikan sumur di *alas* timur seolah mendukung dengan mengakui bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pemilik sumur itu memang bukanlah suatu tindak pencurian, lagi-lagi dengan argumen

yang sama bahwa hasilnya *toh* juga disetorkan ke Pertamina.

Rupanya ada perbedaan pandangan tentang pemahaman mengenai ‘mencuri’ antara pihak Pertamina dengan warga pemilik sumur. Dengan argumen yang dilontarkan pemilik sumur sebagai pembenar atas tindakannya itu, tentu pihak Pertamina merasa dikelabui. Entah pemahaman tentang mencuri ini sengaja diciptakan oleh pemilik sumur atau tidak, tetapi pada titik ini setidaknya diketahui bagaimana benang merah ideologi samin yang resisten terhadap represi kapitalisme kolonial tercermin melalui penguasaan bahasanya yang khas.

Kesimpulan

Seperi apa dinamika sosial masyarakat penambang dalam sejarah ladang minyak di Sewu Jati? Tulisan ini menggambarkan bahwa sejarah ladang minyak di Sewu Jati adalah sejarah eksploitasi. Eksploitasi berlangsung sejak rezim kolonial Hindia Belanda. Inilah yang mendasari perilaku masyarakat penambang di Sewu Jati melakukan tindakan-tindakan tidak patuh hukum. Datangnya Tuan Rain dan Tuan Marfis sebagaimana dicatat dalam arsip, menjadi awal dimulainya peminggiran ruang hidup masyarakat melalui alienasi faktor produksi. Menjawab pertanyaan kedua penelitian ini, “Bagaimana strategi masyarakat penambang menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam?” Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol negara, masyarakat penambang mengembangkan ekonomi moral. Hal ini dilakukan demi menjaga kelangsungan usahanya. Ekonomi moral yang diulas pada tulisan ini terekspresikan melalui kisah aksi perbanditan, yang tidak lain merupakan strategi masyarakat untuk bertahan dari eksploitasi turun-temurun. Perhitungan ekonomi moral seperti ini sesuai dengan yang dikemukakan James Scott (2000) tentang ekonomi moral petani di Asia Tenggara yang menyatakan bahwa struktur ekonomi masyarakat petani ditopang salah satunya oleh prinsip “dahulukan selamat”. Namun yang membedakan dengan Scott, ekonomi moral yang diterapkan masyarakat penambang di Sewu Jati tidak lain adalah rasionalisasi dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah meluasnya kontrol negara yang bisa mempersempit akses mereka untuk memperoleh sumber penghidupan. Dengan

demikian berdasarkan kajian ini, maka dapat dimengerti bahwa aksi-aksi berupa perlawanan terhadap negara dengan bersiasat terhadap aturan yang diberlakukannya, tidak lain merupakan upaya penambang untuk bertahan dari kegagalan negara melakukan redistribusi sumber daya yang melimpah di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. (Ed.). (2003). *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press.
- _____. (2006). *Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ansari, I. (2007). *Penambangan Emas Tanpa Ijin: Eksploitasi dan Kerusakan Ekologi di Mandor, Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Bachriadi, D. (1998). *Merana di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran-pelanggaran HAM Pada Industri Pertambangan*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi Advokas Masyarakat (ELSAM).
- Batubara, M., dkk. (2006). *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia.
- Delfi, M. (2005). *Dari Desa ke Laggai: Resistensi dan Identitas Orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Dwiyanto, A. (2007). *Peranan Penambangan Minyak Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Semarang: Jurusan Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Juhadi, dkk. (2013). *Persepsi Masyarakat Penambang Tradisional Terhadap Sumber Daya Minyak Bumi di Kawasan Cepu* (hlm. 14-22), diterbitkan oleh *Geo-Image*. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Laporan Akhir Kajian Permasalahan Sosial Kemasyarakatan Sektor Pertambangan tahun 2004, Kerja sama Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK-UGM) dengan Indonesian Mining Association (IMA)*.
- L. Popkin, S. (1986). *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Li, T.M. (2002). *Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman, dalam Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Negoro, P. S. (2012). *Kearifan Lokal Masyarakat Samin untuk Mendukung Konservasi Sumber Daya Hutan di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan, UGM.
- Pranoto, S.W. (2010). *Jawa: Bandit-bandit Perdesaan: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prayogo, D. (2010). "Anatomi Konflik Antara Korporasi dan Komunitas Lokal pada Industri Geometral di Jawa Barat", *Jurnal MAKARA, Sosial Humaniora*, 14 (1), 25-34.
- Peluso, N.L. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Yogyakarta: Insist Press.
- Raharjana, Destha T. (2003). "Siasat Usaha Kaum Santri: Ekonomi Moral dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi, Yogyakarta, dalam Ahimsa-Putra, Heddy Shri, dkk. 2003. *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ricoeur, Paul. (2003). *The Rule of Metaphor: The Creation of Meaning in Language*. London & New York: Routledge.
- Sarmini. (2003). *Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat Manipulatif dalam Industri Penyamakan Kulit di Magetan Jawa Timur* dalam Ahimsa-Putra, Heddy Shri (Ed.). *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa* (hlm. 251-386). Yogyakarta: Kepel Press.
- Scott, J.C. (1994). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia*

- Tenggara (Cetakan Keempat)*. Jakarta: LP3S.
- _____. (2000). *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setyobudi, I. (2005). *Analisis Wacana: Kasus Polemik Teks Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam di Koran Kompas (18 November-13 Desember 2002)*. Yogyakarta: FIB, UGM.
- Sumintarsih. (2003). "Merajut Kerjasama, Menjangkau Pasar: Siasat Resiprositas dalam Usaha Kerajinan Agel di Kulon Progo, Yogyakarta" dalam Heddy Shri Ahimsa- Putra (ed). *Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa* (hlm. 139-250). Yogyakarta: KEPEL Press.
- Tabloid Blok Bojonegoro*, Edisi Januari 2013.
- Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN Press).
- Widodo. (2013). *Menanam adalah Melawan!*. Yogyakarta: Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) dan Tanah Air Beta.
- Wolf. E.R. (1983). *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial
- Yudhanto. 2011. *Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di tengah Rendahnya Imbal Jasa*, dalam *Jurnal Fisip UMRH* Vol.1 No.1, 2011: 75 - 91.
- Zulkarnain, I., dkk. (2003). *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Sumber Video**
- Film Dokumenter "Gubug Reot di atas Minyak Internasional"
- Sumber Laman**
- Tambang Minyak Rakyat*, <http://www.solopos.com/2013/12/04/tambang-minyak-rakyat-470761> (diakses pada 19 maret 2014, Pukul 21.45).
- Liputan6.com, Bojonegoro*, <http://news.liputan6.com/read/30078/tambang-minyak-tradisional-SewuJati>, (diakses pada 19 maret 2014, pukul 22.00),
- Sejarah Industri Minyak di Bojonegoro*, <http://www.jonegoroan.com/sejarah-industri-minyak-di-bojonegoro.html>, (diakses pada 15 April, Pukul 18.00).
- Sudarmojo, Slamet Agus. *Berkah Pedagang "Engkrek" Minyak Sulingan Mengalir*, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68363/berkah-pedagang-engkrek-minyak-sulingan-mengalir>, (diakses pada 7 April 2014, Pukul 12.00).
- Penertiban Sumur Minyak Ilegal di Bojonegoro Mendapat Perlawanan*, <http://news.detik.com/surabaya/read/2014/02/05/202754/2488557/475/penertiban-sumur-minyak-ilegal-di-bojonegoro-mendapat-perlawanan?nd772204btr>, (diakses pada 17 April, Pukul 11.00).
- Pasca Penertiban, Penambang Sumur Tua di Malo Resah*, <http://kanalbojonegoro.com/pasca-penertiban-penambang-sumur-tua-di-malo-resah/>, (diakses pada 17 April, Pukul 11.00).
- Polisi Bojonegoro Sita 15 Ribu Liter Solar Ilegal*, http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/14/058666354/Polisi-Bojonegoro-Sita-15-Ribu-Liter-Solar-Ilegal?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed, (diakses pada 22 Mei 2015, Pukul11.00).
- Polisi Dilema Tangani Minyak Sumur Tua*, <http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/polisi-dilema-tangani-minyak-sumur-tua>, (diakses pada 17 April, Pukul 11.00).
- Jejak Hitam Keraton di Kulon Progo*, <http://indoprogress.com/2014/04/jejak-hitam-keraton-di-kulonprogo/>, (diakses pada 15 Agustus 2014, Pukul 13.00).
- Konflik Tambang Bersama Korban-korbannya*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2055595/konflik-tambang-dan-korban-korbannya>, (diakses pada 16 Agustus 2014, Pukul 10.00).

Penambang Minyak Tradisional, <http://www.sakti.tv/penambang-minyak-tradisional/>, (diakses pada 22 September 2014, Pukul 22.00).

Potensi Tersembunyi Kaum Samin Margomulyo, <https://winwinfaizah.wordpress.com/category/bojonegoro/>, (diakses pada 27 Oktober 2014, Pukul 11.00).

Sejarah Perminyakan di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perminyakan_di_Indonesia, (diakses pada 14 Januari 2015, Pukul 10.00).